

Kerawanan Politik Pascapilpres 2004

Mohammad Fajrul Falaakh

PUTARAN pertama pemilihan presiden (pilpres-1), 5 Juli 2004, harus berlanjut ke putaran kedua (pilpres-2), 20 September 2004. Meski metode hitung cepat (*quick count*) LP3ES-NDI menunjukkan keunggulan pasangan Yudhoyono-Kalla dibandingkan yang lainnya (hampir 34 persen), capaian itu tak melampaui 50 persen sehingga pilpres-1 hanya mengantar pasangan dengan peringkat kesatu dan kedua ke babak akhir.

Tulisan ini mengajukan beberapa faktor penjelas (*explanatory factors*) mengapa hasil pilpres-1 seperti itu, apa dampaknya setelah pilpres-2. Dalam uraian ini diajukan lima faktor, yaitu konfigurasi politik hasil Pemilu 1999, "ideologi" negara kesatuan, pragmatisme politik yang berpadu dengan pilihan kelembagaan (*electoral design*), budaya politik, dan perilaku para calon presiden. Beberapa faktor ini akan menghasilkan kepresidenan minoritas yang mengandung sejumlah kerawanan politik.

INDONESIA memerlukan sistem pilpres yang mengatasi kemajemukan dan ketersebaran penduduk agar pilpres menghasilkan dukungan integratif kepada presiden. Maka dipilih syarat berat untuk menjadi presiden, yang dituangkan dalam UUD 1945 (Revisi), yaitu didukung oleh lebih dari 50 persen suara pemilih yang tersebar di separuh jumlah provinsi dan paling sedikit memperoleh dukungan 20 persen di tiap provinsi itu.

Sekarangnya ada dua kemungkinan untuk memenuhi tuntutan itu, yaitu mengharap kemunculan seorang pemimpin besar bangsa atau memilih presiden melalui koalisi raya. Kemungkinan pertama sulit terwujud dan tak dapat direkayasa tanpa mesin kekuasaan yang rapi, seperti birokrasi dan terutama militer, maupun cara-cara otoriter.

Kemungkinan kedua gagal mewujudkan diri. Perolehan suara tertinggi Pemilu 1999 hanya 33 persen (diperoleh oleh PDI-P), sedangkan konfigurasi politik yang dihasilkan bersifat fragmentaris dan tidak memunculkan konsensus politik sejati. Artinya, tidak ada satu partai atau kandidat presiden pun dapat memenangi pilpres-1.

Syarat konstitusional dan ideologis untuk babak pertama itu lantas dinihilkan oleh proyeksi pertarungan kekuasaan antarpantai. Dipilihlah syarat yang lebih ringan untuk pilpres-2, yaitu hanya diikuti pasangan calon presiden-wapres yang menduduki peringkat pertama dan kedua pada putaran pertama. Dampaknya, seberapa besar jumlah suara tidak sah dan golput, pasangan dengan suara terbanyak sederhana dapat didudukkan sebagai presiden melalui putaran kedua.

Makna pemilihan secara langsung oleh rakyat juga berkurang pada sistem pilpres karena hanya partai atau koalisi partai yang dapat mencalonkan pasangan presiden-wakil presiden (wapres). Pilpres lebih menjadi agenda elite partai. Penentuan kandidat bukan didasarkan pada dukungan rakyat langsung (bandingkan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah), tetapi oleh partai yang melampaui ambang batas perolehan suara (*electoral threshold*) sebanyak lima persen dari total suara sah dalam pemilu parlemen. Sebenarnya amandemen konstitusi dapat mencantumkan syarat,

pasangan calon presiden-wapres harus didukung lima persen suara pemilih (atau syarat dukungan untuk pencalonan anggota DPD), yang tersebar di separuh jumlah provinsi.

MENINGAT persyaratan untuk memenangi pilpres-1 begitu berat dan tidak satu partai pun didukung suara mayoritas dalam Pemilu 2004, partai-partai yang melampaui *electoral threshold* dapat berkoalisi memenangi pilpres 2004 pada putaran pertama. Koalisi itu tidak terbentuk dan tidak satu pun dari ketujuh partai peraih *electoral threshold* mengajukan pasangan calon presiden-wapres dari partai sendiri, terutama karena masing-masing pimpinan atau tokoh partai harus menjadi presiden. Pencalonan Wiranto (Golkar), Megawati (PDI-P), Amien Rais (PAN), SB Yudhoyono (PD) dan Hamzah Haz (PPP) mengikuti pola sama, pola "calon wapres dari luar partai sendiri".

Pendek kata, para ketua maupun tokoh partai ingin menjadi presiden, cukup memilih tokoh yang bersedia menjadi wapresnya. Mereka tak cukup peduli dengan jumlah *electoral threshold* partai dalam pemilu parlemen, sejak awal tak berhasil membangun koalisi secara serius, tidak hirau "dasar-dasar ideologis" yang diusung calon pasangan maupun koalisi pendukungnya, serta melupakan integritas perilaku dan etika politik antarpolitical atau kelompok yang pernah saling dialami. Terpenting, merebut peluang menduduki kursi kepresidenan.

MENINGAT *construct*, proses, dan postur pencalonan presiden-wapres yang demikian, dan sadar akan kegagalan pada putaran pertama, belum terkomunikasikan pula susunan kabinet menjelang pilpres 5 Juli. Artinya, gesekan dan tawar-menawar politik belum selesai dilakukan atau sengaja diulur, re-aliansi dapat terjadi pascaputaran pertama, dan politik dagang sapi ikut mewarnai babak akhir pilpres 2004. Kepresidenan Indonesia amat mungkin dibentuk melalui koalisi terbatas, praktik yang biasa dalam sistem parlementer.

Pencalonan presiden-wapres hanya dapat dilakukan partai politik, dan keunggulan pada putaran pertama dapat ditambah legitimasi dukungan koalisi semu menuju putaran kedua. Bila koalisi semu tak terjadi, dukungan mayoritas sederhana sudah cukup untuk meraih jabatan presiden melalui putaran kedua pilpres 2004. Dengan dukungan minoritas dibandingkan yang tidak memilihnya dan dengan modal awal dukungan partai yang jumlahnya lebih kecil, meski mungkin memanfaatkan koalisi terbatas atau "kabinet pelangi" lain lagi, presiden akan terkendala; lebih-lebih jika ingin melakukan konsolidasi demokrasi melalui stabilisasi pemerintahan guna menghadapi aneka masalah besar bernegara.

Dukungan bagi pasangan presiden-wapres, yang terpilih dari pilpres-2 tak berbanding lurus dengan dukungan politik dan stabilitas di parlemen. Presiden terpilih tidak merupakan pantulan lurus "kosmologi Indonesia raya" (syarat untuk putaran pertama), sedangkan konfigurasi suara di parlemen tersebar pada tujuh partai besar dan beberapa partai kecil. Dalam konteks ini, serta ditambah perilaku, etika, dan kebiasaan politik parlemen yang mungkin seburuk periode 1999-2004, beberapa potensi kerawanan politik sudah dapat ditengarai: godaan otoritarianisme atas nama stabilisasi pemerintahan, hubungan eksekutif-legislatif yang saling mengecoh, *money politics* untuk mengamankan kebijakan pemerintah, atau kepresidenan yang tak leluasa bekerja tanpa dukungan memadai di parlemen (*lame*

duck presidency). Mendung masih bergelayut di atas cakrawala politik Indonesia. (Sumber: *Kompas*, 8/7/2004)